

SKRIPSI

**MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANBERBASIS
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA UMKM DIKABUPATEN
PINRANG**

(STUDI KASUS PADA INTI FOTO)

MUH.RIDWAN

1057303961 12



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

SKRIPSI

**MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA UMKM DI KABUPATEN
PINRANG**

(STUDI KASUS PADA INTI FOTO)

MUH. RIDWAN

10573 03961 12

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Jurusan Akuntansi*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA UMKM DI KABUPATEN PINRANG**

Nama Mahasiswa : Muh. Ridwan
No. Stambuk/Nim : 10573 03961 12
Jurusan : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang Studi : STRATA SATU (S-1)
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 07 Oktober 2017

Pembimbing I


Dr. Mahmud Nuhung, MA.
NIDN: 497794

Menyetujui:

Pembimbing II


Muttiarni, SE., M.Si
NIDN: 0930087503

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi


Ismail Rasulong, SE, MM
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

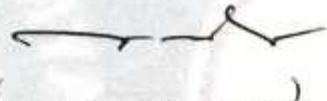
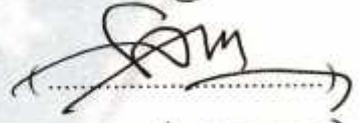
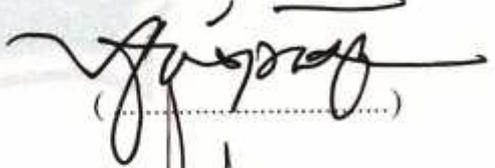

Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak
NBM: 1073428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama MUH RIDWAN., Nim 10573 03961 12 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 1438 H/ 2017 M dan telah dipertahankan didepan penguji pada hari sabtu, 07 Oktober 2017 M sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Muharram 1439 H
Makassar, 07 Oktober 2017 M

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekertaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM (PD. 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
 1. Dr. H. Muh. Rusydi Rahman, M.Si. 
 2. Abd. Salam HB, SE, M.Si.Ak.CA 
 3. Moh Aris Pasigai, SE, MM 
 4. Agusdiwana Suwarni, SE, M.ACC 

MOTO DAN PERSEMBAHAN

semakin banyak hal yang aku ketahui, maka aku akan mengerti bahwa semakin banyak lagi yang akan diketahui. Karena hidup adalah pelajaran untuk mencapai sebuah pengalaman yang berarti dalam diri kita masing-masing.

Ingat hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan dan petunjuk karena Dialah pemilik semua yang ada di bumi dan dilangit.

Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku, dan seluruh keluargaku yang senantiasa selalu menyertai langkahku dalam setiap do'anya.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Wr.Wb

Tiada untaian terindah yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis bahasakan. Karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan segala prosesi dan menyusun kata demi kata, merangkai kalimat demi kalimat dan akhirnya dikemas menjadi skripsi. Skripsi ini saya serahkan kepada almater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dari lubuk hati terdalam perkenankanlah penulis menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua penulis yang tercinta ayahanda **Lawajo** dan ibunda **Sarawiah** atas segala doanya yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai, semua ketulusan berkorban jiwa dan raga kepada penulis yang tak ada bandingannya. Semoga ananda mampu membalas setiap tetesan keringat yang orang tua keluarkan demi membimbing ananda menjadi seorang manusia.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Ibu **Muttiarni, SE,M.Si** selaku pembimbing II dan **Dr.Mahmud Nuhung, MA**.selaku pembimbing I yang

dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan kepada penulis mulai dari awal hingga selesainya penulisan ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Pembantu Rektor Unismuh dan segenap Staf yang ada di Unismuh. Terima kasih atas kemudahan yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dekan, Pembantu Dekan, dan seluruh dosen pengajar beserta karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar kebijakan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan Muchriana Muchran, SE,M.Si.Ak.CA. Selaku Sekertaris di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Para dosen khususnya pada jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama duduk di bangku kuliah, Buat pak Faidul Adzhiem,SE,M.Si, dan pak Sultan Sarda terima kasih atas bantuannya.
5. Kepada Pak Dedi selaku Pemilik Ukm Inti Foto
6. Para Staf di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar,.

7. Terima kasih kepada Raha' Spd. selaku teman yang selalu bisa memahami, menyayangi dan menjadi motivator bagi penulis selama ini.
8. Buat Teman-teman "UKM Seni dan Budaya TALAS Unismuh Makassar" Biru Kuning Mallontara Jaya Selamanya.
9. Buat keluargaku yang tergabung dalam Pinrang (MAHAPALA) Mahasiswa Pattinjo Pecinta Alam makasih buat kenangannya.
10. Buat Teman-teman (Himansi) Himpunan mahasiswa jurusan Akuntansi.
11. Buat keluarga dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan akan memberikan sumbangasih bagi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, September 2017

Penulis

ABSTRAK

MUH. RIDWAN,2017. Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK ETAP) Pada UMKM di Kabupaten Pinrang. Skripsi Jurusan Akuntansi, Program Sarjana Satu Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I: H. Mahmud Nuhung, dan Pembimbing II Muttiarni

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui UMKM Inti Foto sudah menerapkan SAK ETAP?, 2). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana UKM Inti Foto menyajikan laporan keuangannya, diikuti dengan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Penelitian menyimpulkan sebagai berikut: 1) Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan, serta uraian-uraian yang telah dikemukakan bahwa UKM Inti Foto belum menerapkan SAK ETAP, laporan-laporan yang disajikan oleh UKM Inti Foto hanya berupa pencatatan yang menurut sepemahamannya saja yaitu untuk mengetahui Laba/omset saja, jelas kurang sesuai karena dalam prosedural pelaporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Maka dari itu penulis melakukan implementasi laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP agar UKM Inti Foto dapat menerapkannya, 2) Keberadaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diperuntukan untuk usaha kecil dan menengah, keberadaannya belum banyak diketahui oleh para pemilik UKM dan masih rendahnya pemahaman SAK ini, 3) Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Serta tidak pernah mengikuti pelatihan tentang pelaporan keuangan akuntansi dan 4) Tidak adanya keharusan penggunaan SAK ETAP dari pemerintah.

Kata Kunci: SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Usaha Mikro Kecil Menengah

ABSTRACT

MUH. RIDWAN, 2017. Financial Reporting Preparation Mechanism Based on Financial Accounting Standards Entity Without Public Accountability (SAK ETAP) At SMEs in Pinrang Regency. Supervisor I: H. Mahmud Nuhung, and Muttiarni II Advisor

The purpose of this research are: 1) To know UMKM Core Photo already apply SAK ETAP ?, 2). The research method used is descriptive qualitative approach, that is to describe or describe how SME Core Photos present its financial report, followed by studying literature books related to research problem.

The research concludes as follows: 1) Judging from the results of research conducted, as well as the descriptions that have been proposed that SME Core Photos have not applied SAK ETAP, the reports presented by SMEs Core Photos only in the form of records that according to sepemahamanya just to know Profit / turnover only, obviously less appropriate because in the procedural of financial reporting based on SAK ETAP that is Income Statement, Statement of Change of Equity, Balance Sheet, Statement of Cash Flow, Notes to Financial Statement. Therefore, the authors make the implementation of financial statements in accordance with SAK ETAP for SME Photo Core can apply it, 2) The existence of Financial Accounting Standards Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) intended for small and medium enterprises, its presence has not been widely known by the owners of SMEs and still low understanding of this SAK, 3) Lack of human resources who have the ability in preparing financial statements. And never participated in training on accounting financial reporting and 4) Absence of necessity use of SAK ETAP from government.

Keywords: SAK ETAP, Financial Accounting Standards Entity Without Accountability Public, Micro Small Medium Enterprises

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Laporan Keuangan	6
1. Pengertian Laporan Keuangan	6
2. Kualitatif Laporan Keuangan.....	9
3. Penyajian laporan keuangan.....	11
4. Tujuan Laporan Keuangan.....	14
B. SAK ETAP.....	16
1. Pengertian SAK ETAP	16
2. Persiapan penerapan SAK ETAP.....	18

3. Ruang lingkup SAK ETAP	19
4. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP	20
5. Karakteristik dan Implementasi SAK-ETAP	27
6. Perbedaan SAK-ETAP dengan PSAK	30
C. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)	38
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	38
2. Peran dan Fungsi UMKM	42
3. UMKM sebagai Kearifan Lokal	44
D. Penelitian Terdahulu	44
E. Kerangka Pikir.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	51
B. Metode Pengumpulan Data	51
C. Jenis Dan Sumber Data	51
D. Teknik Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah UMKM Inti Foto	54
B. Analisa Data	57
C. Pembahasan	59
D. Sistem Pencatatan Keuangan Inti Foto.....	63
E. Penerapan SAK ETAP pada UMKM Inti Foto.....	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Perbedaan SAK-ETAP dengan PSAK.....	30
Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).....	40
Penelitian Terdahulu	44
Laporan Keuangan Sederhana Inti Foto.....	58
Laporan Laba Rugi.....	60
Laporan Perubahan Ekuitas.....	61
Neraca	61
Laporan arus kas	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Kerangka Pikir	50
Struktur Organisasi Inti Foto.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan keuangan sederhana.....	80
Lampiran 2 Surat keterangan Inti Foto.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Namun praktek akuntansi keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2014). Kurangnya kemampuan pelaku UKM dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala yang dihadapi UKM, antara lain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman pelaku UKM tersebut dalam bidang akuntansi. Biasanya pembukuan UKM dilakukan dengan cara-cara sederhana dan tidak detail (Krisdiartiwi, 2011).

Semakin berkembangnya usaha, menuntut UKM untuk berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan pendanaan UKM akan berhubungan dengan pihak bank/ lembaga keuangan lainnya. Pihak bank/ lembaga keuangan tersebut biasanya akan mensyaratkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari UKM. Demikian juga ketika UKM akan mengikuti lelang pengadaan barang maupun jasa yang diadakan oleh pihak rekanan, pihak

rekanan biasanya akan meminta laporan keuangan sebagai syarat kelengkapan administratif. Dengan demikian semakin berkembangnya usaha, menuntut UKM untuk menyediakan laporan keuangannya dengan baik sesuai standar yang berlaku.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 17 Juli 2014 dan berlaku efektif 1 Januari 2011. Diterbitkannya SAK ETAP bertujuan untuk diimplementasikan pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Pada umumnya, UKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik karena UKM pada umumnya belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi UKM dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP serta untuk merancang sistem akuntansi sederhana yang dapat membantu dan memudahkan para pemilik UKM dalam membuat laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Dengan laporan keuangan tersebut diharapkan pemilik UKM dapat mengevaluasi usahanya serta dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnisnya.

Besarnya potensi UKM yang ada saat ini ternyata belum sebanding dengan tingkat kemajuan UKM. Dalam melakukan kegiatan UKM masih menghadapi beberapa masalah. Masalah yang mempunyai bagian yang cukup besar yaitu masalah modal, teknologi, dan keahlian manajerial (Soetrisno, 2015).

Salah satu masalah UKM adalah pengelolaan keuangan dan permodalan dimana UKM masih menghadapi kendala yang cukup serius. Fenomena yang terjadi adalah UKM menghadapi kendala permodalan dan sedikitnya para investor yang bersedia meminjamkan atau menanamkan modalnya pada UKM walaupun menghasilkan laba yang cukup besar. Alasan mendasar adalah UKM tersebut tidak dapat menunjukkan bukti operasional dan keuntungan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Krisdiartiwi (2011:1) selama ini pembukuan sering dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan "kurang begitu penting" dalam membangun bisnis. Padahal, bagi sebuah perusahaan, pembukuan sangat diperlukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Tak hanya bagi perusahaan besar, pembukuan juga mutlak diperlukan bagi usaha kecil menengah atau UKM.

Adanya laporan keuangan membuat pihak luar dapat menganalisis kelayakan pemberian kredit atas permohonan yang diajukan. Laporan keuangan yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya akan sangat membantu proses evaluasi kelayakan kredit. Namun sebagian besar UKM belum mampu menyediakan informasi keuangan dengan benar dan teratur sehingga mereka mengalami kendala dalam mengajukan kredit pada lembaga formal seperti pihak perbankan.

Semua pihak menyadari pentingnya akuntansi dalam sebuah bisnis, tetapi UKM di Indonesia belum secara baik mempraktikkannya. Sehingga UKM tidak dapat mengetahui prestasi kerja dan kesulitan dalam pengajuan kredit ke lembaga

formal. Kita tidak bisa menyalahkan UKM yang selalu enggan melakukan pembukuan transaksi dan bervariasinya pelaporan keuangan UKM, karena PSAK umum yang terlalu rumit untuk usaha sektor kecil. SAK ETAP ini akan membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal.

Kehadiran SAK ETAP dengan prinsip kesederhanaan dapat memberikan kemudahan UKM dalam menyajikan laporan keuangan. Standar ETAP diharapkan memberi kebebasan berbisnis, kebebasan berinvestasi dan membangun ekonomi kerakyatan berbasis UKM bagi Indonesia. Dengan aplikasi SAK ETAP dalam dunia UKM membuat tumbuh suburnya UKM. Selain itu SAK ETAP juga memberi kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Namun pada kenyataannya SAK ETAP belum banyak diterapkan para pelaku UKM dalam menyusun laporan keuangan. di Indonesia khususnya yang ada di Kota Pinrang dalam menyusun laporan keuangan.

Penyusunan yang sesuai dengan standar SAK ETAP laporan dalam SAK ETAP (2014:3.12) meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan keuangan. Melihat fenomena masih banyaknya UMKM yang belum bisa menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, maka peneliti tertarik membuat penelitian dengan judul **“Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM di Kabupaten Pinrang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dan dicari solusinya dalam penelitian ini adalah:

Apakah mekanisme penyusunan laporan keuangan pada UMKM Inti Foto sudah sesuai SAK ETAP ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyusunan Laporan Keuangan yang di terapkan oleh Inti Foto sudah sesuai dengan SAK-ETAP.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan penelitian pada UMKM Inti Foto mengenai Mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP
- b. Sebagai bahan tambahan referensi untuk penulis sendiri maupun untuk para penilitilain yang ingin mengadakan penelitian sesuai dengan masalah atau objek yang sama

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Laporan Keuangan

1. Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi tentang keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu, dan digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu (Sujarweni, 2016). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Sadeli dalam Sujarweni (2016) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis.

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah catatan atas hasil proses akuntansi sebuah perusahaan yang meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan oleh pihak perusahaan pada periode tertentu sebagai pelaporan ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai informasi.

Mengingat pemakai laporan keuangan Perusahaan adalah pengurus,

pengawas serta stakeholder lain (pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan) maka laporan keuangan harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif laporan keuangan, antara lain :

1. Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan diantaranya adalah:
 - a. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan,
 - b. Laporan keuangan merupakan bagian dari sistem pelaporan yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan
 - c. Laporan keuangan harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan berguna juga untuk mengetahui :
 - 1) Prestasi unit kegiatan Perusahaan yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu.
 - 2) Prestasi unit kegiatan Perusahaan yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu.
 - 3) Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
2. Kepatuhan terhadap standar akuntansi
Perusahaan harus menyatakan secara eksplisit dan secara penuh atas

kepatuhan terhadap SAK-ETAP yang dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan. Pernyataan ini tidak boleh dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangannya jika tidak memenuhi semua ketentuan SAK-ETAP

3. Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

Laporan keuangan harus disusun atas dasar kelangsungan usaha dan asumsi menurut seorang pembaca laporan keuangan, bahwa Usaha Kecil dan Menengah akan meneruskan operasionalnya dimasa depan kecuali apabila laporan keuangannya disusun untuk tujuan tertentu, seperti rencana pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan, maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Komponen laporan keuangan

Usaha Kecil dan Menengah harus menyajikan laporan pertanggung jawaban keuangan Perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang sekurang-kurangnya diterbitkan sebanyak 1 (satu) bulan sebelum kegiatan rapat anggota tahunan diselenggarakan, berupa :

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Ekuitas.
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan;

Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan disertai dengan lembar pernyataan tanggung jawab pengurus yang ditanda tangani

diatas materai cukup oleh pengurus.

2. Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya bersifat kuantitatif, namun agar informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakai maka harus memenuhi karakteristik kualitatif, dengan karakteristik kualitatif tersebut, informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pemakai (Martani dkk, 2016).

Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan menurut IAI (2013) diuraikan sebagai berikut :

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna;

b. Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan;

c. Materialitas

Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk

mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) mempengaruhi keputusan yang diambil;

d. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu);

e. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

f. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi;

g. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi;

h. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif;

i. Tepat Waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan;

j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

3. Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Muljono (2012), penyajian wajar dari laporan keuangan yang mematuhi SAK ETAP antara lain dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban, konsep

dan prinsip pervasif. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

b. Kepatuhan pada SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atau kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

c. Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hak-hak tersebut. Untuk membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi

kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

d. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan : Fakta tersebut Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.

e. Penyajian yang konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antarperiode harus konsisten kecuali jika terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi

Informasi komparatif Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

f. **Materialitas dan Agregasi**

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau mencatat suatu pos di anggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat memengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

4. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi (Sadeli dalam Sujarweni, 2016). Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (Revisi 2009) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan laporan keuangan secara umum yaitu

- a. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.
- c. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.

d. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu.

Pemakai laporan keuangan beragam baik pihak eksternal maupun internal. Pemakai internal adalah manajemen. Informasi digunakan manajemen untuk melakukan perencanaan dan pengendalian entitas. Berdasarkan informasi penjualan, manajemen dapat melakukan tindakan perubahan orientasi penjualan dari satu lokasi ke lokasi lain, atau justru melakukan ekspansi penjualan, penambahan jumlah staf bagian pemasaran atau melakukan kebijakan meningkatkan harga jual. Pihak eksternal yang menggunakan informasi akuntansi beragam dan tujuan yang berbeda. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk menilai harga saham, kemudian melakukan keputusan untuk membeli atau menjual investasi di sebuah entitas. Kreditur menggunakan informasi untuk menentukan kelayakan sebuah entitas untuk diberikan kredit, sehingga sangat memperhatikan kemampuan entitas untuk membayar utang dan bunga di masa mendatang. Pihak pajak menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan berapa jumlah pajak yang dibayar oleh sebuah entitas.

Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari:

a. Neraca

Yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu.

b. Laporan rugi laba

Yaitu laporan mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

c. Laporan perubahan ekuitas

Yaitu laporan yang menyajikan perubahan ekuitas karena penambahan dan pengurangan dari rugi/laba dan transaksi pemilik.

d. Laporan arus kas

Yaitu laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu.

e. Catatan atas laporan keuangan

Yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

B. SAK ETAP

1. Pengertian SAK ETAP

Menurut Muljono (2012) standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar akuntansi keuangan (SAK) dibedakan menjadi SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan SAK EAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas dengan Akuntabilitas Publik). Perusahaan pengguna SAK juga akan dibedakan sebagai perusahaan dengan laporan keuangan entitasnya tanpa akuntabilitas publik (ETAP) dan laporan keuangan entitasnya dengan akuntabilitas publik (EAP). Entitas merupakan setiap unit atau organisasi yang dapat dipandang atau diperlakukan sebagaimana layaknya individu menurut ketentuan hukum yang berlaku. Setiap unit atau lembaga yang keberadaannya dijamin atau dilindungi oleh ketentuan

hukum yang berlaku. Dengan kata lain entitas adalah setiap individu atau organisasi yang berbadan hukum (Wibowo, 2015).

Penggunaan EAP diantaranya mencakup perbankan dan perusahaan yang *GoPublic* di Bursa Efek Indonesia. ETAP sendiri lebih diarahkan untuk perusahaandengan skala kecil dan menengah yang kesulitan dalam menerapkan SAK secara penuh. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposefinancial statement*) bagi pengguna eksternal.

Pemisahan antara SAK ETAP dan SAK EAP diharapkan dapat meminimalkan perbedaan antara SAK di Indonesia dan *IFRS* sehingga laporan keuangan akan lebih mudah dipahami dan juga akan meningkatkan kualitas keterbandingan (*comparability*) terutama oleh pengguna dari berbagai negara. Sama dengan *IFRSfor SMEs*, SAK ETAP maupun *IFRS for SMEs* sama-sama diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, hanya saja istilah yang digunakan sebagai judul pada *IFRS* adalah *small and medium sized enterprises (SMEs)*. Perbedaan antara SAK Indonesia dan *IFRS* memang masih tetap ada, namun konvergensi ke *IFRS* penuh akan dapat diminimalkan, agar memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan bersangkutan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah membentuk tim kerja untuk menyusun standar akuntansi keuangan bagi UMKM. Hal ini karena keberadaan standar akuntansi keuangan (SAK) UMKM

sudah lama dinantikan. Penyusunan ini dengan mengadopsi draf *IFRS for SMEs* yang telah diterbitkan pada Februari 2007. Adopsi yang dilakukan oleh DSAK-IAI akan lebih fleksibel, karena draft dari *IFRS* sangat kompleks. Selama ini banyak dari UMKM belum menyusun laporan keuangan karena ketiadaan standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Akibat dari permasalahan tersebut, perbankan menerapkan kriteria dan syarat penyaluran kredit yang sama antara UMKM dan usaha besar, yang sebenarnya tidak tepat diukur dari kemampuan antar keduanya. Terkait hal itu, Standar Akuntansi Keuangan untuk UMKM sebagai infrastruktur UMKM agar layak dari sisi peraturan bank harus berbeda dengan SAK non UMKM. Standar inilah yang kita kenal sekarang sebagai SAK ETAP, dimana UMKM telah dikategorikan sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Munculnya SAK ETAP sendiri dimaksudkan agar konvergensi *IFRS* dapat segera diwujudkan secara penuh, sehingga perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan untuk menerapkan SAK penuh dapat mengadopsi SAK ETAP sebagai standar keuangan yang lebih sederhana.

2. Persiapan penerapan SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang memiliki 2 kriteria yaitu: tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan, dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal dalam kriteria kedua ini adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga

pemeringkat kredit

Kriteria ETAP di atas bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu jika

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UMKM, oleh karena itu pengguna ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UMKM. Penerbitana SAK ETAP oleh DSAK IAI ini adalah sebagai alternatif SAK yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk SAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Umum yang lebih rumit (Basir:2010).

3. Ruang lingkup SAK ETAP

Berdasarkan ruang lingkup SAK ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal; atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut. SAK ETAP dapat digunakan oleh:

1. UMKM
2. Koperasi
3. Perseroan Privat
4. Bank Pengkreditan Rakyat (diizinkan oleh Bank Indonesia)

4. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

Menurut Muljono (2012), Laporan keuangan entitas dianggap lengkap apabila meliputi berikut ini :

- a. Judul dan sub jumlah, entitas menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam angka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas.
- b. Format urutan, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan, namun hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca. Sebagai tambahan pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran,

sifat atau fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos-pos yang serupa membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. Uraian yang digunakan dan urutan pos-pos atau agregasi terhadap pos-pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka memahami posisi keuangan entitas.

c. Klasifikasi aset dan kewajiban, entitas harus menyajikan:

1) Aset lancar, entitas mengklasifikasikan aset lancar jika :

- a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.
- b) Dimiliki untuk diperdagangkan.
- c) Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, atau
- d) Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

2) Aset tidak lancar

Entitas mengklasifikasikan semua paragraf lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

3) Kewajiban jangka pendek, entitas mengklasifikasikan kewajiban jangka pendek jika :

- a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi

entitas.

- b) Dimiliki untuk diperdagangkan
 - c) Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan atau
 - d) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- 4) Kewajiban jangka panjang, entitas mengklasifikasikan semua kewajibanlainnya sebagai kewajiban jangka panjang.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013), pengertian laporan keuangan yang lengkap suatu entitas meliputi :

1. Neraca

Neraca adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan dari laporan ini tidak lain adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan (Hery, 2016). Neraca dapat digambarkan sebagai potret kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu (*snapshot* keuangan perusahaan), yang meliputi aset (sumber daya atau *resources*) perusahaan dan klaim atas aset tersebut (meliputi utang dan saham sendiri). Aset perusahaan menunjukkan keputusan

penggunaan dana atau keputusan investasi pada masa lalu, sedangkan klaim perusahaan menunjukkan sumber dana tersebut atau keputusan pendanaan pada masa lalu. Dana diperoleh dari pinjaman (utang) dan dari penyertaan pemilik perusahaan (modal) (Hanafi dan Halim, 2014).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013), yang disajikan dalam neraca antara lain adalah :

- a. Pos-pos neraca
- b. Judul dan sub jumlah
- c. Format urutan

Pos-pos dalam neraca meliputi :

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya
- c. Persediaan
- d. Properti investasi
- e. Aset tetap
- f. Aset tidak berwujud
- g. Utang usaha dan utang lainnya
- h. Aset dan kewajiban pajak
- i. Kewajiban diestimasi
- j. Ekuitas

2. Laporan laba rugi

Menurut Sujarweni (2016) laporan laba rugi adalah laporan yang disusun sistematis, isinya penghasilan yang diperoleh perusahaan dikurangi dengan beban-beban yang terjadi dalam perusahaan selama periode tertentu. Laporan rugi laba menjabarkan elemen-elemen penghasilan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi. Untuk perusahaan jasa istilah penghasilan dalam laporan laba rugi adalah pendapatan. Untuk perusahaan dagang dan

manufaktur istilah penghasilan dalam laporan keuangan adalah penjualan.

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Informasi yang disajikan pada laporan laba rugi antara lain adalah :

- a. Pos-pos laba rugi, laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut :
 - 1) Pendapatan
 - 2) Beban keuangan
 - 3) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
 - 4) Beban pajak
 - 5) Laba atau rugi neto
- b. Judul dan sub jumlah, entitas harus menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.
- c. Pos luar biasa, entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan

3. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu, bisa satu bulan atau satu tahun. Melalui laporan perubahan ekuitas, pembaca laporan dapat mengetahui sebab-sebab perubahan

ekuitas selama periode tertentu (Martani dkk, 2016). Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas, dan dividen serta distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut. Informasi yang disajikan pada laporan perubahan ekuitas menunjukkan :

- a. Laba atau rugi untuk periode tahun berjalan
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan.
- d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah yang berasal dari :
 - 1) Laba atau rugi
 - 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
 - 3) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.
- e. Laporan perubahan ekuitas, yang menunjukkan seluruh perubahan dalam

ekuitas atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

4. Laporan arus kas

Menurut Muljono (2012) laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ada beberapa kasus dimana perusahaan menguntungkan (selalu memperoleh laba), tetapi tidak mampu membayar utang-utangnya kepada *supplier*, karyawan, dan kreditur-kreditur lainnya. Perusahaan-perusahaan yang sedang tumbuh biasanya mengalami kejadian semacam itu (menguntungkan tetapi tidak mempunyai kas yang cukup) (Hanafi dan Halim, 2014).

Entitas menyajikan laporan arus kas untuk suatu periode dan diklasifikasikan menurut :

- a. Aktivitas Operasi, meliputi semua transaksi dan kejadian lain yang bukan merupakan kegiatan investasi atau pendanaan. Termasuk transaksi yang melibatkan produksi, penjualan, penyerahan barang atau jasa.
- b. Aktivitas Investasi, meliputi pemberian kredit, pembelian atau penjualan investasi jangka panjang seperti pabrik dan peralatan.
- c. Aktivitas Pendanaan, meliputi transaksi untuk memperoleh dana dan distribusi *return* ke pemberi dana dan pelunasan utang.

5. Catatan atas laporan keuangan

Menurut Martani, dkk (2016) catatan atas laporan keuangan merupakan pengungkapan (*disclosure*), baik yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan, dari akun-akun yang dilaporkan atau peristiwa yang dihadapi oleh perusahaan yang dapat memengaruhi posisi dan kinerja keuangan perusahaan, sehingga sering kali ditekankan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (Muljono, 2012).

5. Karakteristik dan Implementasi SAK-ETAP

a. Karakteristik SAK-ETAP

- 1) Stand alone accounting standard (tidak mengacu ke SAK Umum).
- 2) Mayoritas menggunakan historical cost concepts.
- 3) Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan Usaha Kecil dan Menengah.
- 4) Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK Umum
 - Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang paling sederhana
 - Penyerdehanaan pengakuan dan pengukuran
 - Pengurangan pengungkapan
- 5) Tidak akan berubah selama beberapa tahun.

b. Implementasi SAK-ETAP

PSAK ETAP mulai diberlakukan pada akhir tahun 2011. Penggunaan PSAK ini harus konsisten untuk tahun-tahun berikutnya. Apalagi yang sudah memutuskan untuk menggunakan PSAK umum dalam penyajian laporan keuangan, maka untuk selanjutnya tidak boleh merevisi kebijakannya ke PSAK ETAP.

Entitas dapat menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara prospektif. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka:

- 1) Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK ETAP;
- 2) Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan tersebut;
- 3) Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP;
- 4) Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui.

Penerapan secara retrospektif artinya bahwa kebijakan akuntansi yang baru diterapkan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah digunakan sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang baru, diterapkan pada

kejadian atau transaksi sejak tanggal terjadinya kejadian atau transaksi tersebut. Sedangkan penerapan secara prospektif artinya kebijakan akuntansi yang baru, diterapkan pada kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan terhadap periode sebelumnya.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neracanya berdasarkan SAK ETAP mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK ETAP diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan SAK ETAP.

Pada tahun awal penerapan SAK ETAP, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini. Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi

persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETA ini dalam menyusun laporan keuangan.

6. Perbedaan SAK-ETAP dengan PSAK

Tujuan laporan keuangan menurut (PSAK dalam Martani, 2016) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

No	Elemen	PSAK	SAK ETAP
1	Penyajian Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan posisi keuangan • Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan • Pembedaan asset lancar dan tidak lancar dan laibilitas jangka pendek dan jangka panjang • Aset lancar • Laibilitas jangka pendek • Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan (Perubahan istilah di ED PSAK 1: Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan, Kewajiban (liability) menjadi laibilitas) 	<p>Sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca, yang menghilangkan pos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aset keuangan • Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (ED PSAK 1) • Aset biologik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar (ED PSAK 1) • Kewajiban berbunga jangka panjang • Aset dan kewajiban pajak tangguhan • Kepentingan nonpengendalian

2	Laporan Laba Rugi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan laba rugi komprehensif <ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang disajikan dalam laporan Laba Rugi Komprehensif • Laba rugi selama periode • Pendapatan komprehensif lain selama periode • Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan 	<p>Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi.</p>
3	Penyajian Perubahan Ekuitas		<p>Sama dengan PSAK, kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain.</p>
4	Catatan Atas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan atas laporan keuangan • Struktur • Pengungkapan kebijakan Akuntansi • Sumber estimasi ketidakpastian • Modal (ED PSAK 1) • Pengungkapan lain 	<p>Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal.</p>
5	Laporan Arus Kas	<ul style="list-style-type: none"> • Arus kas aktivitas operasi: metode langsung dan tidak langsung • Arus kas aktivitas investasi • Arus kas aktivitas 	<p>Sama dengan PSAK kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arus kas aktivitas operasi: metode tidak langsung • Arus kas mata

		<p>pendanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arus kas mata uang asing • Arus kas bunga dan dividen, pajak penghasilan, transaksi non-kas 	uang asing, tidak diatur.
6	Laporan keuangan Konsolidasi dan terpisah	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan penyajian lapkeu konsolidasi • Entitas bertujuan khusus • Prosedur konsolidasi • Lapkeu tersendiri • Lapkeu gabungan 	Tidak diatur
7	Kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan	<p>PSAK 25 (Laba atau Rugi Bersih untuk periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laba atau rugi bersih untuk Periode berjalan <ul style="list-style-type: none"> • Pos luar biasa • Laba atau rugi dari aktivitas normal • Operasi yang tidak dilanjutkan • Perubahan estimasi Akuntansi ▪ Kesalahan Mendasar ▪ Perubahan kebijakan Akuntansi <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan suatu standar Akuntansi keuangan • Perubahan kebijakan Akuntansi yang lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi • Konsistensi dan perubahan kebijakan akuntansi • Perubahan Estimasi akuntansi • Kesalahan. SAK ETAP sudah maju satu langkah dibandingkan PSAK (tidak ada “kesalahan mendasar” dan “laba atau rugi luar biasa”).
8	Instrumen Keuangan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup: aset dan kewajiban keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup: investasi pada efek

		<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen keuangan dasar: • Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan • Impairment menggunakan incurred loss concept • Derecognition • Hedging dan derivatif 	<p>tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi trading, held to maturity, dan available for sale. Hal tsb mengacu ke PSAK 50 (1998).
9	Persediaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran persediaan • Biaya persediaan • Biaya pembelian • Biaya konversi • Biaya lain-lain • Biaya persediaan pemberian jasa • Teknik pengukuran biaya • Rumus biaya • Nilai realisasi bersih • Pengakuan sebagai beban • Pengungkapan 	Sama dengan PSAK
10	Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup: entitas asosiasi • Metode akuntansi • Metode biaya • Metode ekuitas • Model nilai wajar (ED PSAK 15) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup: entitas asosiasi dan entitas anak • Metode akuntansi • Entitas asosiasi : metode biaya • Entitas anak : metode ekuitas
11	Investasi pada perusahaan asosiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jointly controlled operation, asset, and 	Sama dengan PSAK kecuali metode

	dan entitas anak	entity <ul style="list-style-type: none"> • Metode akuntansi • Metode konsolidasi proporsional • Metode ekuitas • Model nilai wajar (ED PSAK 12 : PBA/PBO/PBE) 	akuntansi hanya menggunakan metode biaya.
12	Property Investasi	Metode akuntansi <ul style="list-style-type: none"> • Model nilai wajar Model biaya	Metode akuntansi: model biaya
13	Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kompenenisasi • Pengukuran menggunakan model biaya atau model revaluasi • Pengukuran biaya perolehan • Pengakuan pengeluaran selanjutnya • Penyusutan • Tidak perlu review nilai residu, metode penyusutan, dan umur manfaat setiap akhir periode pelaporan, tetapi jika ada indikasi perubahan saja 	<p>Sama dengan PSAK kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan pendekatan kompenenisasi. • Revaluasi diijinkan jika dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal ini mengacu ke PSAK 16 (1994) • Tidak perlu review nilai residu.
14	Asset Tidak Berwujud	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip umum untuk pengakuan • Pengakuan awal, pengukuran selanjutnya • Amortisasi selama umur manfaat atau 10 tahun Penurunan nilai	Sama dengan PSAK, kecuali aset tidak berwujud yang diperoleh dari penggabungan usaha.

		<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode pembelian • Goodwill dimaortisasi 5 tahun atau 20 tahun dengan justifikasi manajemen 	Tidak diatur
15	Sewa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur perjanjian yang mengandung sewa • Klasifikasi bersifat <i>principle based</i> • Laporan keuangan lessee 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa (ISAK 8)
		Lessor (orang yg menyewakan)	<ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi sewa: kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS 13 • Laporan keuangan lessee dan lessor menggunakan PSAK 30 (1990): <i>Akuntansi SewaGuna Usaha</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban diestimasi • Kewajiban kontinjensi • Aset kontinjensi 	Sama dengan PSAK
16	Ekuitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan • Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT • Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT • Reorganisasi • Selisih penilaian kembali 	Sama dengan PSAK, kecuali : Reorganisasi Selisih penilaian kembali
17	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penjualan barang • Penjualan jasa • Kontrak konstruksi • Bunga, dividen dan royalti 	Sama dengan PSAK.

		<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran kasus pengakuan pendapatan (ED PSAK 23) 	
18	Biaya Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> • Komponen biaya pinjaman • Pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman 	Biaya pinjaman langsung dibebankan
19	Penurunan Nilai Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan nilai persediaan • Penurunan nilai non-persediaan • Penurunan nilai goodwill 	<p>Sama dengan PSAK, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset. • Tidak mengatur penurunan nilai goodwill • Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31: <i>Akuntansi Perbankan</i> paragraf 16 dan 17.
20	Imbalan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Imbalan kerja jangka pendek • Imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti menggunakan PUC • Imbalan jangka panjang lainnya <p>Pesangon pemutusan kerja</p>	<p>Sama dengan PSAK, kecuali untuk manfaat pasti menggunakan PUC dan jika tidak bisa, menggunakan metode yang disederhanakan</p>
21	Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan <i>deferred tax concept</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan <i>tax payable concept</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan dan pengukuran pajakkini • Pengakuan dan pengukuran pajaktanggungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adapengakuan danpengukuran pajaktanggungan
22	Mata Uang Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Mata uang pencatatan dan pelaporan • Mata uang fungsional • Penentuan saldo awal • Penyajian komparatif • Perubahan mata uang pencatatan dan pelaporan 	<p>Sama dengan PSAK <i>Mata Uang Pelaporan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mata uang fungsional • Pelaporan transaksi mata uang asing dalam mata uang fungsional • Perubahan mata uang fungsional (Pada prinsipnya sama)
23	Peristiwa setelah akhir periode pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa yang memerlukan penyesuaian • Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian 	Sama dengan PSAK
24	Pengungkapan pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa • Pengungkapan 	Sama dengan PSAK 7
25	Aktivitas Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi perkoperasian • Akuntansi minyak dan gas bumi • Akuntansi pertambangan umum • Akuntansi perusahaan efek • Akuntansi reksa dana 	Tidak diatur

		<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi perbankan dan asuransi 	
26	Ketentuan Transisi		<ul style="list-style-type: none"> • Retrospektif atau prospektif (jika tidak praktis) yang diterapkan secara prospective catchup (dampak ke saldo laba) • Perpindahan dari dan ke SAK ETAP
27	Tanggal Efektif		Berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, penerapan dini 1 Januari 2010

C. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No.20 Tahun 2008, UMKM ialah salah satu motor penggerak perekonomian di Negara kita. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia (Widyanto, 2012).UMKM yang ada di negara kita menyumbang sekitar 60% dari PDB (*Product Domestic Bruto*) dan juga memberikan kesempatan kerja pada banyak masyarakat Indonesia. Jadi, bisnis UMKM di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan peluang usaha bagi mereka yang menyukai dunia wirausaha.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Widyanto, 2012):

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria UMKM

Ukuran Usaha	Asset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	Maksimal 3 Milyar
Usaha Menengah	>500 Juta-10 Milyar	>2,5-50 Milyar

Menurut keputusan Presiden RI no.99 tahun 1998 dalam Pujiyanti (2015), pengertian usaha kecil adalah : kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Pujiyanti (2015) pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja yaitu usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dalam Pujiyanti (2015), pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau aset setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari:

1. Bidang usaha (Fa, CV, PT, UD, dan koperasi)
2. Perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)

Walaupun dunia usaha di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, tidak sedikit di antara kita yang kesulitan untuk memilih jenis usaha yang akan digeluti. Alasannya beragam, ada yang sulit memulai usaha karena kurangnya modal, kurang pengalaman, tidak punya pengetahuan bisnis, dan masih banyak lagi kendala lainnya. Tentu saja semua kendala dan tantangan ini tidak membuat kita berhenti berusaha dalam membangun bisnis sendiri, karena setiap usaha memang akan selalu punya tantangan tersendiri yang harus dilalui. Menurut Pujiyanti (2015) ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UMKM untuk menghasilkan laba yaitu:

1. Usaha manufaktur

Usaha manufaktur ialah usaha yang mengubah *input* dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Contoh dari usaha manufaktur adalah konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, *souvenir* dan sebagainya.

2. Usaha Dagang

Usaha dagang ialah usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contoh dari usaha dagang adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari.

3. Usaha Jasa

Usaha jasa merupakan usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Sebagai contoh ialah jasa pengiriman barang atau warung internet (warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen.

Undang-undang dan peraturan tentang UMKM adalah sebagai berikut :

1. UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
2. PP No.44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
3. PP No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
4. Inpres No.10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
5. Keppres No.127 Tahun 2001 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang dan Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan.
6. Keppres No.56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
7. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
8. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
9. Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2. Peran dan Fungsi UMKM

UMKM ialah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. UMKM ini sangat memiliki peranan penting dalam

keberlangsungan perekonomian masyarakat.UMKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga unit rumah tangga.Selain itu UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapabilitas lebih besar.UMKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Analisis makro ekonomi UMKM memiliki peran strategis dalam pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sesuai dengan UU.No 20 Tahun 2008 Bab III pasal V yang berbunyi meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Potensi UMKM di Indonesia ke depan masih terus berkembang. Sentra-sentra UMKM harus dikelola dengan baik.Pemasaran produk UMKM dimulai dari lingkup kecil, seperti kabupaten atau provinsi. Setelah itu, baru didorong agar nasional dan *go international* dikarenakan sektor UMKM adalah basis utama kemandirian ekonomi. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkembangkan (UMKM) di daerah.Pemerintah daerah harus mendorong peningkatan daya saing UMKM dengan meningkatkan pembangunan insfrastruktur yang bisa mempermudah pemasaran produk.Peluang UMKM Indonesia dapat dikatakan sangat besar, memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi di daerah maupun dalam mengurangi pengangguran serta UMKM dapat terus menggali kearifan lokal daerahnya

masing-masing.

3. UMKM sebagai Kearifan Lokal

Kearifan lokal, terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) atau kebijaksanaan dan lokal (*local*) atau setempat. Kearifan adalah sifat yang melekat pada karakter seseorang, yang berarti arif dan bijaksana, sedangkan lokal adalah kondisi sebuah tempat atau setempat. Makna kearifan lokal sangatlah luas terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tata nilai, kebiasaan, tradisi, baik budaya maupun agama, yang menjadi aturan dan kesepakatan lokalitas. Karena itu kearifan lokal bisa juga dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan tertanam serta diikuti oleh anggota masyarakatnya (Baedowi, 2015).

Kearifan lokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.kamusbesar.com) adalah kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal (material dan non material) yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik atau positif. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan nilai, kebiasaan, tradisi serta budaya yang melekat pada suatu tempat (lokalitas) yang menjadi kekuatan setempat.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dalam menyusun kerangka berpikir penelitian. Selain

itu, penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dari penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilakukan.

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu:

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dinna Yolanda /2015	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada PT. BPR Indra Candara.	Deskriptif Komparatif	Selama ini perusahaan menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar dari PSAK Umum dan belum menerapkan SAK ETAP yang menjadi standar penyusunan laporan keuangan bagi BPR.
	Priscilia Christina Sumendap, David P. E. Saerang, dan Novi S. Budi arso /2015	Evaluasi Penerapan 'SAK ETAP' Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipita Cemerlang Indonesia.	Deskriptif Komparatif	Perusahaan telah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, namun masih terjadi inkonsistensi dan belum mematuhi SAK ETAP secara penuh dalam penyajian laporan keuangan.

2.	Arma Yuliza dan Sri Yunawati (2015)	Analisis Pemahaman Terhadap Penerapan SAK-ETAP pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pasir Pengaraian	Deskriptif Kuantitatif	Sudah menerapkan SAK ETAP sejak tahun 2010 dan telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap penerapan SAK ETAP.
3.	Iim Marifatul Aliyah (2012)	Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP pada UKM	Menggunakan metode kualitatif, yang mengulas dan menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi berdasarkan SAK ETAP di lapangan pada UKM	Kesulitan yang muncul untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi, karena hampir semua pengusaha tidak menerapkan konsep akuntansi dalam usahanya, sehingga sulit untuk memisahkan antara harta pribadi dengan perusahaan dan keberadaan SAK ETAP belum banyak diketahui oleh para pelaku UKM.
4.	Marry Setiady (2011)	Telaah Kesiapan dan Prospek Implementasi SAK ETAP: Studi Kasus Pada Pengusaha UMKMGarment di Pusat	Menggunakan UKM sebagai objek penelitian	Sebagian UMKMGarment telah siap mengimplementasikan SAK ETAP dalam pembuatan laporan keuangannya, kemudian untuk UMKMGarment yang belum siap, bersedia mengi

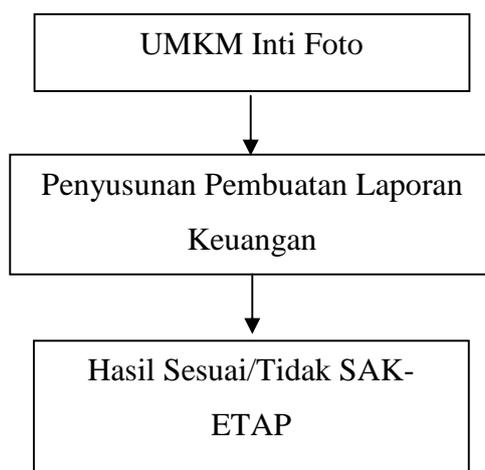
		Grosir Surabaya		mplementasikanSAK ETAP dalam pembua tan laporan keuanganya pada
5.	IMade Narsa, AgusWidododan Sigit Kurnianto.(2012)	MengungkapKesiapanUMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan.	Menggunakanmetode kualitatif yang menjelaskan sejauh mana UMKMemahami kegunaan laporankeuangan yang disusun berdasarkanstandar akuntansi yangbaku	Laporan keuanganberperan sangat penting disamping sebagai acuan bagipemilik usaha dalam pengambilan keputusan, juga terutama untuk memperolehgambaran kondisi kinerjakeuangan perusahaan.
6.	Pratiwi Sariningtyasdan TitukDiahW. (2012)	StandarAkuntansi KeuanganEntitasTanpa AkuntabilitasPublik pada UsahaKecil danMenengah.	MenggunakanSAKETAP sebagaistandar pelaporan keuanganyang baku bagiUKM.	laporankeuangan berpengaruh positifterhadap kebutuhan SAK ETAPbagi UKM.

7.	Hermon AdhiPutra dan Elisabeth Pentikurniawati. (2012)	Penyusunan Laporan Keuangan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKEAP).	Menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kebutuhan UKM atas sistem akuntansi serta rancangan laporan keuangan sesuai dengan SAKETAP.	Kendala dalam pembuatan laporan keuangan antaralain karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu yang difokuskan untuk membuat laporan keuangan.
8.	Dharma T. (2010)	Rancangan penerapan standar akuntansi keuangan Entitas tanpa akuntabilitas publik (SAKETAP) pada usaha Kecil dan menengah	Metode pengumpulan data secara kuisiонер dengan menyebarkan kuisiонер ke 110 usaha UKM. data primer yang telah didapat kemudian dikumpulkan melalui distribusi angket.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UKM telah menerapkan akuntansi, dan dari hasil akuntansi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan suatu unit usaha. Implikasi dari penelitian ini diharapkan membantu para usaha UKM untuk menerapkan akuntansi sehingga dapat memajukan usahanya.

9.	Endang Haryani (2012)	Penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) dan upaya pengembangan usaha kecil menengah pada konveksi Tingkir lor	Metode pengumpulan data secara kuisisioner dan metode analisis kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi di usaha konveksi Tingkir lor dibuat berdasarkan kekuatan dan kelemahan
10	Siti Anisah/ 2012	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) BPR di PD BPRBKK Mojolaban.	Deksriptif Kualitatif	PD BPR BKK Mojolaban sudah menerapkan SAK ETAP pada pelaporan keuangannya tetapi masih belum lengkap. Masih ada yang penyajiannya belum sesuai dengan ketentuan yaitu pos yang terdapat di neraca.

E. Kerangka Pikir

Sebagai salah satu jenis usaha di Indonesia yang memberikan kontribusi paling besar dari sektor perekonomian, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan perkembangan usaha jenis UMKM ini. Salah satu caranya yaitu dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan ETAP bagi para pelaku jenis usaha UMKM. SAK ini mengatur para pelaku UMKM dalam hal membuat laporan keuangan bagi jenis usahanya. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi pelaku UMKM untuk memaksimalkan laba yang akan ditargetnya. Atas penjelasan di atas, maka akan terbentuk kerangka berpikir teoritis sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat. Penulis melakukan penelitian di sebuah UKM bernama Inti Foto berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 29.

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi atau data yang di butuhkan, penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari beberapa buku literatur yang erat hubungannya dengan materi yang diteliti yang dapat mendukung pokok bahasan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Wawancara (*interview*), yaitu cara pengumpulan data dengan jalan melakukan Tanya jawab untuk mendapatkan data yang diperlukan pada Foto Inti Pinrang.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas :

- a. Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (non-numerik). Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan observasi (Sugiyono, 2014). Data kualitatif yang dibutuhkan berupa profil perusahaan dan uraian singkat mengenai pencatatan akuntansi pada Inti Foto.
- b. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan (numerik) (Sugiyono, 2014). Data kuantitatif diperoleh melalui laporan keuangan pada Inti Foto.

Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data internal yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak informan. Data primer dilakukan dengan cara wawancara maupun observasi langsung terhadap pemilik Inti Foto sehingga dapat diperoleh keterangan yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Data lain juga diperoleh dari data yang sudah ada di Inti Foto dalam bentuk dokumen dan informasi lain terutama pada informasi keuangan yang terjadi pada setiap kegiatan UMKM yang dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangan, antara lain adalah laporan kas keluar masuk, perusahaan serta laporan lainnya yang mendukung pembuatan laporan keuangan.

D. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga

setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda (Sugiyono,2014). Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki (Cevilla, dkk 1993).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara dan observasi terkait pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh Inti Foto.
2. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang terdapat pada Inti Foto, apakah penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK ETAP atau belum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah UMKM Inti Foto

Percetakan foto Inti Foto yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 29 Kabupaten Pinrang merupakan salah satu contoh Usaha Mikro Kecil Menengah yang bergerak di bidang usaha Studio Foto dan percetakan khusus foto. UMKM Inti Foto ini didirikan oleh Pak Dedi yang dimana pada saat itu beliau masih menjalankan usaha tersebut bersama ibu beliau saja, beliau memulai usahanya dengan bermodalkan sebuah alat 1 mesin print. Dari waktu ke waktu usaha beliau pun mulai meningkat dan konsumen beliau pun makin bertambah hingga sekarang.

Seiring berjalannya waktu pelanggan pencetak foto pada Inti Foto pun semakin meningkat baik para fotografer pernikahan, penjualan Aksesoris, maupun yang lainnya. Namun perkembangan usaha Inti Foto yang meningkat tersebut, tidak diiringi dengan pencatatan keuangan yang baik. Inti Foto hanya melakukan pencatatan penerimaan kas yang diperoleh dari para konsumen yang sudah melakukan pembayaran piutang dan melakukan pembayaran tunai pada saat melakukan percetakan tersebut secara langsung, sedangkan mengenai pencatatan yang lain Inti Foto tidak melakukannya.

Pada kasus ini, peneliti akan membantu Inti Foto dalam mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan dan menilai kinerja usahanya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas (ETAP). Hal ini diharapkan dapat membantu

UMKM Inti Foto dalam membuat laporan keuangan. Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai standar penyusunan laporan keuangan karena Inti Foto merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Inti Foto tidak mengajukan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pendaftaran

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) melainkan usaha Inti Foto hanya menyusun laporan pembayaran piutang saja, ketidakmampuan pemilik dalam melakukan pencatatan yang benar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pemilik terhadap bagaimana laporan keuangan yang sesuai dengan usaha pemilik. Maka dari itu peneliti bermaksud membantu mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan dan menilai kinerja usahanya yang sesuai dengan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sehingga dapat digunakan oleh UMKM Inti Foto untuk membuat laporan keuangan usahanya sendiri. Adapun visi dan misi dari usaha ini yaitu:

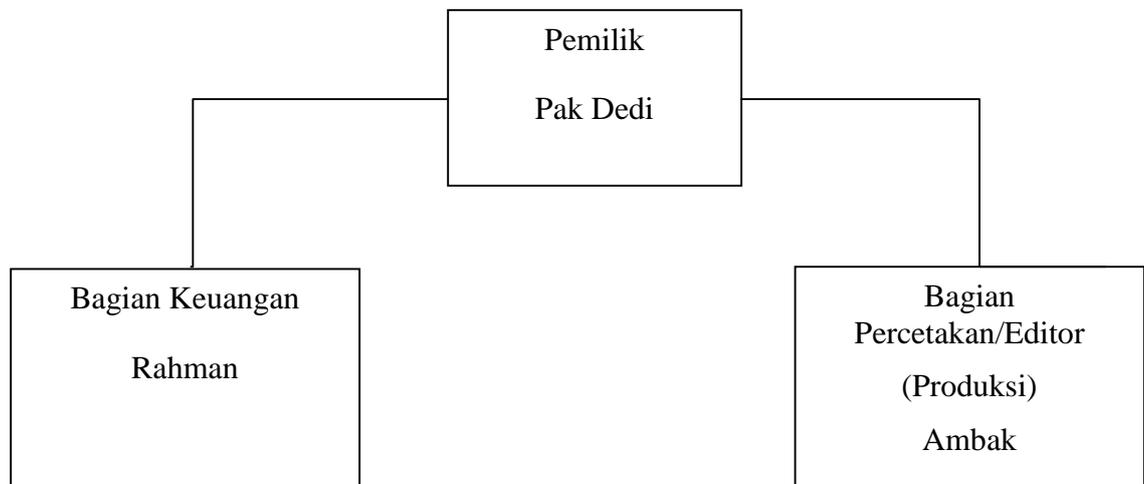
Visi: menjadikan usaha Inti Foto ini berkualitas dikenal oleh masyarakat, disukai oleh para fotografer pernikahan terkhusus wilayah Pinrang Sidrap dan Enrekang

Misi:

- a. Inovasi baru terkait peralatan yang masih langka ditemui di masyarakat
- b. Memberi pandangan positif kepada masyarakat, mengenai peralatan bahan yang digunakan berkualitas

c. Kreativitas dalam hal pemasaran sehingga terlihat unik

Struktur organisasi yang ada pada usaha Inti Foto tidak tertulis dan masih sangat sederhana. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pemilik Usaha dapat digambarkan struktur organisasi Inti Foto sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Inti Foto (Sumber. Hasil Wawancara,)

Pendeskripsian Tugas:

a. Pemilik

- Pemegang keputusan paling menentukan
- Mengawasi setiap aktifitas usahanya
- Bertanggung jawab atas perusahaan secara keseluruhan

b. Bagian Administrasi Keuangan

- Pengelola Kas (bertanggung jawab atas kas keluar dan kas masuk)
- Membuat Laporan Keuangan (dalam hal menurut versinnya)

c. Bagian Percetakan (Produksi)

- Pelaksana teknis dalam hal aktivitas percetakan/produksi

B. Analisa Data

Laporan sederhana, komponen laporan keuangan yang disajikan selama ini, pada UMKM masih melakukan laporan laba rugi sedangkan untuk komponen neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan belum menyajikan. Hal tersebut dikarenakan pelaku UKM hanya ingin mengetahui laba/omset dari usaha yang dijalankan. UKM Inti Foto berusaha membuat laporan keuangan sesimpel mungkin agar bisa di pahami oleh pengguna laporan keuangan dan untuk mengetahui laba/omset tanpa harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (ETAP). Jadi latar belakang pendidikan pemakai laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar terhadap bentuk penyusunan pencatatan keuangan yang diterapkan oleh UKM Inti Foto. Adapun laporan sederhana Inti Foto adalah sebagai berikut.

INTI FOTO

Kategori : Laporan Keuangan
Periode : 31 Desember 2015

Pendapatan :

Inti Foto Jualan

Barang Studio (Aksesoris Foto)	Rp.	60.000.000
--------------------------------	-----	------------

Inti Foto Digital Printing

Pencetakan (Dokumentasi Pengantin, Seminar, dll.)	Rp.	51.940.000
---	-----	------------

Total Pendapatan	Rp.	111.940.000
-------------------------	------------	--------------------

Pengeluaran :

Biaya Barang Studio

Modal Barang Studio (kamera poket, Album, dll.)	Rp	79.600.000
---	----	------------

Kewajiban

Pembayaran Listrik (PLN)	Rp.	200.000
--------------------------	-----	---------

Pembayaran Air	Rp.	200.000
----------------	-----	---------

Pembayaran Akses Internet	Rp.	500.000
---------------------------	-----	---------

Biaya Pemeliharaan Alat & Perlengkapan

Alat Barang Studio	Rp.	500.000
--------------------	-----	---------

Komputer	Rp.	2.500.000
----------	-----	-----------

Mesin Print	Rp.	3.000.000
-------------	-----	-----------

Gedung	Rp.	8.000.000
--------	-----	-----------

Biaya Tak Terduga

Biaya Lain-lain	Rp.	1.500.000
-----------------	-----	-----------

Total Pengeluaran	Rp.	16.400.000
--------------------------	------------	-------------------

Total Pendapatan Bersih	Rp.	15.940.000
--------------------------------	------------	-------------------

Terbilang : Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

C. Pembahasan

Darilaporan-laporan yang disajikan oleh UKM Inti Foto hanya berupa laporan sederhana saja, jelas kurang sesuai karena dalam prosedural pelaporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Adapun mekanisme penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai berikut :

a. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditur untuk membantu mereka memprediksi jumlah, penetapan waktu dan ketidakpastian dari arus kas masa depan, suatu laporan sistematis tentang penghasilan, beban, laba maupun rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi membantu pemakai laporan keuangan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam beroperasi dan memprediksi hasil operasi perusahaan dimasa yang akan datang. dan menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Adapun data yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan laba/rugi ini antara lain:

1. Data seluruh pendapatan pada Inti Foto mulai dari penjualan aksesoris dan pendapatan.
2. Data semua beban yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha Inti Foto

”Seperti beban perlengkapan, beban listrik dan air dan beban lainnya

Inti Foto
Laporan Laba Rugi
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

Pendapatan :		
Penjualan		Rp 111,940,000.00
Harga Pokok Penjualan		Rp 79.600.000.00
Beban :		
Beban Perlengkapan	Rp	500,000.00
Beban Penyusutan Peralatan	Rp	7,500,000.00
Beban Penyusutan Gedung	Rp	8,000,000.00
Beban Listrik dan Air	Rp	400,000.00
Total Beban		Rp 16.400.000
Laba		Rp 15.940.000

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Inti Foto
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

Modal Awal	Rp, 176,500,000.00
Laba Tahun Berjalan	Rp, 15,940,000.00
Modal Akhir	Rp, 192,440,000.00

c. Neraca

Laporan neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. Pada neraca akan disajikan informasi mengenai total Aktiva dan total Passiva yang dimiliki Inti Foto.

Inti Foto
Neraca
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

ASET		PASSIVA	
Aset Lancar			
Kas Di Bank	Rp. 39,190,000.00	Utang Gaji dan Upah	Rp 1,750,000.00
Kas Kecil	Rp. 1,000,000.00		
Perlengkapan	Rp. 500,000.00		
Persediaan Produk Selesai	Rp. 21,500,000.00		
Total Aset Lancar			Rp 62,190,000.00
Aset Tetap			
Peralatan	Rp37,500,000.00	Modal Usaha	Rp 192,440,000.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp7,500,000.00		
			Rp 30,000,000.00
Tanah			Rp 30,000,000.00
Gedung	Rp. 80,000,000.00		
Akumulasi Penyusutan Gedung	Rp. 8,000,000.00		

	Rp.	72,000,000.00
Total Aset Tetap	Rp.	132,000,000.00
Total Aset	Rp.	194,190,000.00 Rp 194,190,000.00

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Inti Foto
Laporan Arus Kas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
Penjualan	111,940,000.00
Harga Pokok Penjualan	(Rp 79.600.000)
Beban Perlengkapan	Rp 500,000.00
Beban Listrik dan Air	Rp 400,000.00
Beban Penyusutan Peralatan	Rp 7,500,000.00
Beban Penyusutan Gedung	Rp 8,000,000.00
	(Rp 16.400.000)
Saldo Kas 31 Desember	Rp 15.940.000

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan pada Inti Foto untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 yaitu:

1. Untuk menghitung beban Perlengkapan diperhitungkan dari Perlengkapan

awal sisa perlengkapan dengan perhitungan Rp1.000.000 Rp 500.000= Rp500.000.

2. Untuk menghitung beban Penyusutan gedung digunakan metode garis lurus dengan perhitungan sebagai berikut :

(Harga Beli - Nilai Sisa) : Umur Ekonomis

(Rp 80.000.000 - Rp 72.000.000) :10 = Rp 800.000.

D. Sistem Pencatatan Keuangan Inti Foto

Inti Foto yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 29 Kabupaten Pinrang merupakan salah satu contoh Usaha Mikro Kecil Menengah yang bergerak di bidang usaha percetakan khusus foto. UMKM “Inti Foto” ini didirikan oleh Bapak Dedi yang dimana pada saat itu beliau masih menjalankan usaha tersebut bersama ibu beliau saja, Pemilik usaha mengetahui bahwa pencatatan keuangan suatu usaha penting untuk dilakukan dengan melakukan pencatatan keuangan dapat diketahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran sehingga nantinya dapat menghitung laba yang diperoleh dan dapat mengetahui bagaimana kinerja usahanya, seperti yang tercermin dalam kutipan wawancara dengan Bapak Dedi Pemilik usaha Inti Foto

Pencatatan keuangan perlu, penting sekali, biar kita tahu antara pendapatan dan pengeluaran, Namun dalam implentasinya sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh pemilik usaha Inti Foto masih sangat sederhana dan proses pencatatan yang dilakukan masih dengan cara manual (pengarsipan Nota) Dan dinyatakan Tidak sesuai dengan SAK ETAP dikarenakan tidak melakukan

pencatatan laporan keuangan dan tidak memiliki satupun jenis dalam laporan keuangan.

Alasan pemilik UMKM Inti Foto melakukan pencatatan keuangan semata untuk menentukan besarnya pendapatan usahanya. Berdasarkan atas hasil pengamatan dan wawancara Nampak bahwa pengalaman Bapak Dedi selama 3 tahun sebagai pengusaha telah membuat informan mengerti akan pentingnya melakukan pencatatan atas setiap transaksi usahanya. Keinginan atau niat yang dimiliki informan untuk mengembangkan usaha telah memotivasi informan untuk selalu melakukan pencatatan pencarian dilakukan dengan alasan untuk mengetahui peningkatan dan penurunan pendapatan jasa yang terjadi pada usahanya

Hal ini sejalan dengan teori perilaku beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang dikembangkan oleh orang tersebut. dalam pencatatan akuntansi pada UMKM Inti Foto, Bentuk pencatatan yang kini diterapkan diusaha ini dipengaruhi oleh niat dari pemilik usaha. Niat atau Pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya telah membuat pengusaha tersebut termotivasi untuk melakukan pencatatan atas setiap transksinya dengan rapi, meskipun format yang digunakan berbeda dan tidak melakukan penjurnalan seperti pencatatan transaksi pada akuntansi, karena pengusa ini membuat catatan mnurut pemahamannya pribadi dan pengalaman yang dimiliki tanpa mempelajari pencatatan transaksi pada akuntansi

Pencatatan akuntansi yang diterapkan pada UMKM Inti Foto masih jauh dari SAK ETAP sehingga informasi yang diperoleh dari catatan yang dibuat

belum dapat sepenuhnya mendukung atau bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang lebih menyeluruh dari kegiatan operasional perusahaan. manfaat dan keputusan usaha yang dapat dijalankan berdasarkan akuntansi dan laporan akuntansi berdasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh antara lain:

1. Penilaian kinerja usaha dan sebagai bahan evaluasi untuk yang akan datang
2. Berguna sebagai dasar pertimbangan penelitian bahan baku untuk produksi dan alat-alat produksi.
3. Keputusan mengenai harga, misalnya penentuan harga jual, banting harga, kenaikan harga barang/jasa ,dan lain-lain.
4. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.
5. Untuk pengembangan usaha, keputusan untuk membuka atau menutup cabang
6. Penambahan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan penghasilan karyawan, pemberian bonus kepada karyawan.
7. Penyusunan anggaran untuk periode berikutnya.
8. Penambahan asset usaha.
9. Promosi usaha

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edirara, pada usaha kecil, memang sangat memerlukan informasi tentang kinerja usaha dan informasi tentang kinerja usaha dan informasi tentang posisi keuangannya, Penyajian laporan keuangan yang continue pada usaha kecil harus memperhatikan prinsip

konsistensi sehingga laporan dari periode sebelumnya dapat dibandingkan (komparabilitas) dengan periode berikutnya. Prinsip daya banding (komparabilitas) dapat memberikan informasi perkembangan usaha yang dilakukan selama ini. Apakah usaha tersebut menguntungkan ataukah hanya asal berjalan saja, tanpa memperoleh keuntungan, atau bahkan merugi.

Lebih lanjut musmin mengemukakan bahwa prinsip lain yang harus dipegang dengan baik, tanpa toleransi adalah prinsip kesatuan usaha sangat sulit dijalankan, seperti dalam hal keuangannya, keuangan perusahaan terpisah dengan keuangan pemiliknya. Prinsip kesatuan usaha sangat sulit dijalankan, karena cakupan yang kecil dengan nilai uang yang relatif sedikit selain beberapa hal di atas yang relative tidak ditemukan pada usaha kecil, teknis mengerjakan akuntansi juga dianggap sulit diterapkan karena rumit bagi pemilik ataupun manajer perusahaan, tidak sebanding dengan modal yang berputar pada usaha kecil tersebut yang relative sedikit.

Pada usaha kegiatan yang dilakukan selama peneliti melakukan penelitian antara lain :

- a. Pembelian bahan produksi,
- b. Sistem percetakan dari customer/Pembeli,
- c. Mencatat setiap transaksi pendapatan, penjualan/jasa
- d. Pembayaran hutang atau kredit kepada pihak pemberi pinjaman

Prosedur pencatatan transaksi pendapatan usaha Inti Foto nota akan diberikan kepada pelanggan dan satu lembar nota akan diberikan kepada pelanggan dan satu lembarnya lagi akan digunakan sebagai arsip pada nota tersebut terdapat informasi

mengenai identitas perusahaan, nomor urut nota, tanggal, jenis produk, jumlah satuan, harga satuan, jumlah dan total tagihan.

E. Penerapan SAK ETAP pada UMKM Inti Foto

Implementasi pencatatan akuntansi UMKM berbasis SAK ETAP memberikan manfaat bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan, manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi kreditor pemberi pinjaman dengan implementasi pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP.UMKM dapat menyajikan laporan keuangannya sendiri hal tersebut untuk memenuhi persyaratan utama untuk mengajukan pinjaman kredit kepada lembaga keuangan atau perhatian para kreditor nantinya dapat memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo,
2. Pemilik UMKM dapat mengetahui laba, posisi keuangan, perusahaan ekuitas pemilik dan arus kas perusahaan lebih sederhana
3. UMKM dapat menghitung besaran pajak secara akurat sesuai informasi akuntansi,
4. UMKM dapat diaudit oleh kantor akuntan publik

Mengenai standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada usaha Inti Foto Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena kurangnya pengetahuan pemilik usaha Inti Foto sehingga bentuk pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual saja dan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Pemilik usaha Inti Foto merasa belum profesional untuk membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi, Pemilik kurang disiplin dan rajin dalam

pelaksanaan pembukuan akuntansi usahanya ini dikarenakan waktu yang ada sudah tersita untuk pekerjaan sehingga sulit menyisihkan waktu untuk menyusun sistem pembukuan akuntansi pemilik lebih mengutamakan bagaimana sistem pemasaran yang baik agar memperoleh konsumen yang banyak.

Pandangan dari pemilik usaha bahwa pencatatan tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan perhitungan dan transparansi, ini sesuai dengan teori perilaku beralasan (*Theory of reasond action of reasond action*) yang Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980. Teori ini menyatakan bahwa seseorang atau individu akan bermanfaat sistem informasi dengan alasan bahwa sistem informasi tersebut akan member manfaat atau kegunaan bagi dirinya. Melihat dari kenyataan dilapangan terkait dengan penerapan SAK ETAP jadi dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM akan memanfaatkan atau menginplentasikan pencatatan keuangan berdasarkan SAK ETAP apabila penatatan tersebut akan memberi manfaat atau kegunaan bagi dirinya.

Usaha Inti Foto tidak melakukan pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP juga karena tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan UMKM terutama dari pihak pemerintah, lembaga-lembaga terkait dan regulator. Padahal kepedulian terhadap pengembangan UMKM sudah semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak sesuai dengan bidang yang digelutinya. Sejalan dengan hal tersebut, Raharjo (1993) dalam Auliyah (2012) menyatakan tidak adanya regulasi yang mengakibatkan rendahnya penyusunan laporan keuangan. Jadi perhatian dari pihak regulator terkait dengan

peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM sangat diperlukan.

Pihak perbankan merupakan salah satu pihak ketiga yang berhubungan terkait dengan permodalan UMKM adalah pihak perbankan. Dalam memberikan pinjaman kepada UMKM pihak perbankan selalu memperhatikan aspek kelayakan suatu kegiatan usaha, aspek legalitas, serta *repayment capacity* dan adanya jaminan baik fisik maupun nonfisik sebagai factor pengama. Untuk mengetahui kondisi keuangan calon debitur, maka pihak perbankan memerlukan laporan keuangan selain untuk mengetahui kondisi kesehatan perusahaan utamanya yang mencakup kondisi likuiditas, kecakupan modal, porsi hutang, profitabilitas. Pihak perbankan memerlukan adanya laporan keuangan untuk memperkirakan volume usaha calon debitur yang ditunjukkan dengan besarnya asset dan penjualan serta dengan adanya laporan keuangan pihak perbankan dapat mengestimasi jumlah beban pinjaman yang dapat ditanggung oleh calon debitur.

Selama ini permasalahan yang dihadapi dalam pemberian fasilitas kredit kepada calon kreditur UMKM, yakni tidak tersedianya laporan keuangan usaha yang memadai untuk dianalisa oleh pihak perbankan, meskipun usaha UMKM tersebut *feasible* namun sebagian besar pengusaha mengalami kesulitan dalam penyediaan laporan keuangan untuk memenuhi persyaratan kredit bank. Usaha yang tidak *bankable* dipandang mengandung resiko kredit macet oleh bank. Untuk membantu pelaku UMKM dalam memenuhi syarat kelayakan usaha dengan membuat proforma laporan keuangan.

Jadi proforma laporan keuangan merupakan langkah proaktif yang dilakukan pihak perbankan dalam membantu calon debitur dan mempermudah dalam melakukan analisis kredit, langkah ini merupakan wujud kepedulian pihak perbankan terhadap UMKM. Akan tetapi jika diinterpretasikan lebih jauh tidak hanya semata-mata sebagai wujud kepedulian pihak perbankan terhadap UMKM. Pembuatan proforma laporan keuangan ini juga sebagai bagian dari strategi bisnis perbankan dalam memasarkan kreditnya kepada masyarakat. Persaingan perbankan dalam menyalur kreditnya ke UMKM sangatlah ketat, ini dapat dilihat dari begitu variatifnya program-program kredit yang digulirkan untuk para pelaku UMKM maupun para calon wirausaha muda. Antara Bank satu dengan yang lainnya terjadi persaingan atau kompetisi dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat, strategi dalam menghadapi persaingan ini pun beragam yakni dengan membuka cabang khusus pelayanan kredit usaha, serta mengeluarkan program yang bunganya bersaing dengan program kredit dari bank lain.

Mekanisme pembuatan proforma laporan keuangan ini merupakan salah satu strategi perbankan untuk mempermudah UMKM dalam memenuhi persyaratan mengajukan kredit, hal ini bisa membahayakan karena bisa mendorong pihak perbankan untuk menyalurkan kredit kepada pihak yang tidak tepat. Selain itu hal ini dapat menyebabkan UMKM menjadi malas dalam memenuhi ketentuan SAK ETAP, karena selama ini mereka telah 'dimanjakan' dengan adanya pembuatan proforma laporan keuangan oleh pihak perbankan.

Bahkan seperti yang dilansir dalam situs resmi Bank Mandiri bahwa yang menjadi persyaratan memperoleh KUR adalah :

- Dokumen legalitas permohonan, misalnya KTP atau Kartu Keluarga
- Dokumen Legalitas usaha, misalnya NPWP, SIUP, SKDU
- Foto Copy rekening giro/tabungan 6 bulan

Selain berhubungan dengan pihak perbankan, perlu UMKM juga berhubungan dengan pihak fiskus dalam hal perhitungan serta pembayaran pajak. Pemasukan tambahan dari pajak UMKM merupakan kontribusi yang sangat penting dalam mendukung program pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah serta untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari pinjaman luar negeri. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak maka UMKM harus menyusun Laporan keuangan UMKM dengan SAK ETAP masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mempermudah perhitungan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Maksud pemerintah untuk menyederhanakan perhitungan pajak demi mempermudah perhitungan pajak merupakan suatu hal yang positif, namun dibalik itu implementasi SAK ETAP pada UMKM akan terasa semakin berat, karena untuk bisa membayar pajak kini para pelaku UMKM tidak dituntut untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar, selain itu kurangnya pengawasan pula dari pihak fiskus terkait dari

apa yang dihitung oleh UMKM terkait dengan pajak yang akan dibayarkannya. Selama ini pihak fiskus percaya dengan pajak yang telah dihitung dan dibayarkan oleh pengusaha UMKM, tanpa melakukan *crosscheck* langsung dengan data omset yang sebenarnya, jika nanti ditemukan adanya masalah atau data yang berbeda disaat itulah baru akan dilakukan sinkronisasi oleh piha fiskus terhadap data yang ditemukan tersebut.

Jadi apabila UMKM telah menerapkan pencatatan keuangan sesuai dengan sesuai SAK ETAP pastinya akan mempermudah dalam proses pengajuan pinjaman ke pihak perbankan dan dalam ketepatan perhitungan pajak penghasilan. Untuk terciptanya sector UMKM dengan pengelolaan keuangan yang baik, *professional* dan berdaya saing, maka diperlukan unsure “keharusan” ini diantaranya dapat dilaksanakan dalam bentuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu entitas UMKM guna memperoleh pembiayaan, maupun perijinan-perijinan tertentu. Disinilah diperlukan adanya dukungan dan perhatian dalam bentuk pengawasan (*controlling*) dan pendampingan terhadap implementasi pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP pada UMKM.

Pelaku entitas UMKM perlu diberikan dorongan dan pemahaman terkait manfaat dari pencatatan akuntansi, misalnya manfaat pencatatan transaksi, baik bagi pelaku usaha sendiri maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga, misalnya institusi perijinan dan lembaga pembiayaan. Jadi, tahapan pertama yang dilakukan yakni memunculkan kesadaran/pemahaman pelaku UMKM akan manfaat dan pentingnya pencatatan transaksi, selanjutnya perlu diadakan pelatihan

teknis pencatatan transaksi dan penyusunan laporan. Namun percuma saja pelatihan diadakan jika tanpa adanya tindak lanjut terkait dengan implementasi pencatatan akuntansi pada UMKM. Disinilah diperlukan adanya dukungan dan perhatian *stakeholder* sebagai wujud pengendalian sosial dalam bentuk pengawasan (*controlling*) dan pendampingan terhadap implementasi pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP pada UMKM. Pendampingan ini ditunjukkan untuk memastikan bahwa hasil pelatihan dan standar keuangan yang ada telah diterapkan dengan baik dalam kegiatan sehari-hari.

Dukungan yang bersifat kelembagaan, baik dalam bentuk adanya suatu institusi yang menangani peningkatan kapasitas dan kompetensi entitas UMKM, berbagai kegiatan institusi pemerintah, BUMN maupun BUMS, serta aspek peraturan dan perundangan yang berfungsi sebagai alas hokum kegiatan pengembangan kompetensi UMKM sangat diperlukan dalam upaya implementasi penyusunan laporan dan rencana usaha berbasis SAK ETAP pada UMKM.

Alinea terakhir berdasarkan pada hasil penulis temukan pada mekanisme penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP) pada UMKM di Kabupaten Pinrang Studi Kasus pada Usaha Inti Foto belum diterapkan.

1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan SAK ETAP antara lain rumitnya bahasa yang digunakan dalam SAK ETAP, kurangnya pengetahuan untuk pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, pihak UMKM khususnya pada Inti Foto merasa belum membutuhkan

pencatatan keuangan yang detail dan berdasarkan pedoman seperti SAK ETAP serta rumitnya bahasa yang digunakan dalam SAK ETAP. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UKM pada Inti Foto belum memiliki kemampuan dan kurangnya pengetahuan dasar tentang pencatatan akuntansi. Sehingga sulit untuk menerapkan SAK ETAP

2. Berdasarkan kendala di atas penulis menyarankan bagi pelaku UMKM, khususnya pada Inti Foto harus memiliki sumber daya manusia yang memadai dengan mengikuti pelatihan pencatatan akuntansi agar dikemudian dapat menerapkan pencatatan akuntansi yang lebih baik dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang baku yaitu SAK ETAP agar laporan keuangan tersebut berguna bagi pengguna laporan keuangan baik pemilik usaha maupun pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan penyusunan laporan keuangan pada UMKM maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP pada UKM Inti Foto:
 - a. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Serta tidak pernah mengikuti pelatihan tentang pelaporan keuangan akuntansi.
 - b. Keberadaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diperuntukan untuk usaha kecil dan menengah, keberadaannya belum banyak diketahui oleh para pemilik UKM dan masih rendahnya pemahaman SAK ini. Kurangnya sosialisasi menjadi faktor kurang dikenalnya SAK ETAP dilingkungan UKM.
2. Tidak optimalnya penyelenggaraan praktik akuntansi dan pemanfaatan informasi akuntansi pada UMKM selama ini bukanlah semata-mata merupakan kesalahan ataupun kekurangan para pelaku UMKM, tetapi juga dikarenakan belum optimalnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam mendorong dan memfasilitasi praktik akuntansi di UMKM

B. Saran

1. Bagi pelaku UMKM, khususnya Inti Foto harus memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menerapkan pencatatan akuntansi yang lebih baik dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang baku yaitu SAK ETAP agar laporan keuangan tersebut berguna bagi pengguna laporan keuangan baik pemilik usaha maupun pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan.
2. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami selaku penulis memberikan saran untuk pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan UMKM mengenai proses akuntansi maka harus sering dilakukan sosialisasi standar akuntansi yang berlaku umum bagi UMKM, melalui seminar, pelatihan bagi pengelola UMKM. Diharapkan akan timbul kesadaran mengenai pentingnya memahami dan melaksanakan proses akuntansi sesuai standar yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Baedowi, 2015. *Calak Edu 4: Esai-Esai Pendidikan*, Jakarta: PT.Pustaka Alvabet.
- Cevilla, dkk., 1993. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Pujiyanti, 2015. *Perpajakan & UKM*, Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia.
- Krisdiartiwi. 2011. *Pembukuan Sedarhana Untuk UMKM*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Martani, dkk 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Edisi 2 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Muljono, 2012. *Pengaruh Perpajakan pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Suhairi. 2014. *Personality. Accounting Knowledge. Accounting Information Usage And Performance: A Research On Entrepreneurship Of Indonesia Medium Industries*. Disertasi. USM. Malaysia.
- Sutrisno, Joko dan Sri. 2006. *Jurnal Pengkajian Koperasi Dan Ukm Nomor 2 Pengkajian Koperasi Dan Ukm Nomor 2 Tahun I” - 2006 and Management Consultant Tahun 2014*. Nusa Tenggara Barat.
- Sujarweni, 2016. *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Cv. Alfabeta.
- Widyanto, 2012. *Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Ekonomi.

RIWAYAT HIDUP



MUH. RIDWAN Lahir di Letta, Kec. Lembang (Pinrang) pada tanggal 17 Mei 1994, Anak ke Dua dari Delapan bersaudara. Buah hati dari pasangan bapak Lawajo dan Ibunda Sarawiah. Penulis tamat pada tahun 2006, di SDN 273 Kec. Lembang (Pinrang), dan tamat pada tahun 2009, di SMP Negeri 5 Duampanua dan tamat SMA di Negeri 1 Duampanua (Pinrang).

Pada tahun 2012 terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Jurusan Akuntansi Strata I pada Tahun 2017.

Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pendidikannya atas Rahamat Allah SWT, dengan dukungan dan doa kedua orang tua. Dengan memilih judul skripsi.

“Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM di Kabupaten Pinrang”

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INTI FOTO

Kategori : Laporan Keuangan
Periode : 31 Desember 2015

Pendapatan :

Inti Foto Jualan

Barang Studio (Aksesoris Foto)	Rp.	60.000.000
--------------------------------	-----	------------

Inti Foto Digital Printing

Pencetakan (Dokumentasi Pengantin, Seminar, dll.)	Rp.	51.940.000
---	-----	------------

Total Pendapatan	Rp.	111.940.000
-------------------------	------------	--------------------

Pengeluaran :

Biaya Barang Studio

Modal Barang Studio (kamera poket, Album, dll.)	Rp	79.600.000
---	----	------------

Kewajiban

Pembayaran Listrik (PLN)	Rp.	200.000
--------------------------	-----	---------

Pembayaran Air	Rp.	200.000
----------------	-----	---------

Pembayaran Akses Internet	Rp.	500.000
---------------------------	-----	---------

Biaya Pemeliharaan Alat & Perlengkapan

Alat Barang Studio	Rp.	500.000
--------------------	-----	---------

Komputer	Rp.	2.500.000
----------	-----	-----------

Mesin Print	Rp.	3.000.000
-------------	-----	-----------

Gedung	Rp.	8.000.000
--------	-----	-----------

Biaya Tak Terduga

Biaya Lain-lain	Rp.	1.500.000
-----------------	-----	-----------

Total Pengeluaran	Rp.	16.400.000
--------------------------	------------	-------------------

Total Pendapatan Bersih	Rp.	15.940.000
--------------------------------	------------	-------------------

Terbilang : Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

INTI FOTO
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 29
 Telp. (0421) 924463
 PINRANG

Pinrang, 3 - 10 - 2015
 KEPADA YTH.
RIBDO

NOTA No. _____

No. Order	Sheet	PO	PC	3R	4R	5R	6R	10R	10RJ	LS4	LS2	12R	KET	HARGA
					32								DV 10R 1	11.000
					81								10R = 1	7000
					53								DV CR = 2	8000
					80								CR = 246	307.500
													Album 2 vol 3	90.000
Tanda Terima _____													Jumlah Rp. <u>422.500</u>	

INTI FOTO
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 29
 Telp. (0421) 924463
 PINRANG

Pinrang, _____
 KEPADA YTH.
RIBDO
Endang

NOTA No. _____

No. Order	Sheet	PO	PC	3R	4R	5R	6R	10R	10RJ	LS4	LS2	12R	KET	HARGA
					65		2						Album 2 vol	60.000
					70								10R = 2	14.000
													CR = 143	178.750
Tanda Terima _____													Jumlah Rp. <u>252.750</u>	

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi

Jabatan : Kepala Inti Foto Kota Pinrang

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 29

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Muh. Ridwan

Nim : 105730396112

Fak/ Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Telah selesai melakukan penelitian di Inti Foto Kota Pinrang Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 29 selama 1 (satu) bulan, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP PADA UMKM DI KABUPATEN PINRANG"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 31 Maret 2017

